



RANCANGAN AKHIR

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan III dan IV, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Perubahan Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian perubahan rencana kerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Kota Probolinggo.

Probolinggo, Juni 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**



Dr. R. SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196707111988091001

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (TC. 32)	65
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	45
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TC. 33)	70
BAB IV PENUTUP	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah.

Salah satu instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun setiap tahun. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025–2026, sehingga memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

Namun dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dinamika kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, fiskal, dan prioritas pembangunan kerap mengalami perubahan. Kebijakan dari pemerintah pusat maupun provinsi juga dapat bergeser atau menetapkan program prioritas baru yang perlu diakomodasi. Selain itu, terdapat kemungkinan munculnya kebutuhan mendesak atau keadaan luar biasa yang memerlukan respons cepat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang sudah ditetapkan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja).

Kewajiban melakukan perubahan Renja diatur untuk memastikan bahwa rencana tahunan perangkat daerah selalu mutakhir, relevan, dan responsif terhadap perkembangan terbaru. Perubahan Renja menjadi instrumen formal untuk menyesuaikan target, indikator kinerja, lokasi, dan pendanaan kegiatan apabila

terjadi pergeseran kebijakan, penyesuaian anggaran, atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga pada saat Renja awal ditetapkan. Mekanisme perubahan Renja ini juga menjadi bagian dari sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terintegrasi, sehingga perangkat daerah memiliki dasar legal dan teknis untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai dokumen resmi perencanaan tahunan yang bersifat operasional, Perubahan Renja berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam program dan kegiatan yang lebih terukur, realistis, dan sesuai dengan kondisi aktual. Dokumen ini menjadi jembatan penting antara perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja bukan hanya merupakan pilihan kebijakan, melainkan suatu keharusan administratif dan substantif untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kedua regulasi tersebut secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Perubahan Renja sebagai sarana legal dan teknis dalam menyesuaikan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perkembangan terbaru, baik dari sisi kebijakan prioritas maupun kondisi keuangan daerah.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Renja ini merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota BAB I-6 Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95);
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 96);
23. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Wali Kota No. 7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
25. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 98 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
26. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai dasar dalam penentuan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD;
- b) Sebagai pedoman dan arahan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode setelah perubahan disahkan dengan mengacu pada RKPD Kota Probolinggo dan berpedoman pada Renstra 2019 – 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
- c) Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025;
- c) Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, satu Unit Pelaksana Teknis dan tiga Unit Pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021 sampai dengan 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Capaian Kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja sampai dengan triwulan I belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan belum dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan tidak dapat memenuhi output yang diharapkan.

Reviu hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Tabel di bawah ini mencantumkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 Kota Probolinggo dengan pokok-pokok materi yang tersaji antara lain:

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022 s.d 2024)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2022 s.d 2024)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Targe t (Tahu n 2024)	Realisa si (Tahun 2024)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2025 (s.d Triwulan 1)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom 5+7+9)	11=(kolom 10/9 x 100)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									

1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	29,52	29,52
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	100	100	100	100	100	40	40
1.06.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	2	40
1.06.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	100	4	2	50
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	25	25
1.06.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	36	36	100	42	42	100
1.06.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700	1103	0	0	0	700	150	21,43

1.06.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	4	3	17	17	100	4	1	25
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	0	0
1.06.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	1	100	1	0	0
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100	100	0	0	0	100	16,67	16,67
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	0	60	0	0
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	0	0	0	12	4	33,33
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	100	100	25	25
1.06.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	1	25

1.06.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	0	0	0	4	1	25
1.06.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	4	100	4	1	25
1.06.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	3	25
1.06.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	6	6	6	100	6	1	16,67
1.06.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	24	24	100	24	6	25
1.06.01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	12	12	100	12	4	33,3
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	50	50
1.06.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	5	5	N/A	5	5	100
1.06.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	7	7	100	5	0	0

1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	20	20
1.06.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	100	4	1	25
1.06.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100	11	4	36,36
1.06.01.2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	0	0
1.06.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	4	33,33
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	25	25
1.06.01.2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100	1	1	100

1.06.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	26	26	100	29	5	17,24
1.06.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	2	30	30	100	30	0	0
1.06.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	82	82	82	100	73	9	12,33
1.06.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	4	100	4	2	50
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80,00	80	80,00	80,00	100	81,00	0	0
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	80,00	80	80,00	80,00	100	80,00	0	0
1.06.02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29	29	29	29	100	29	0	0

1.06.02.2.03.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	5	5	100	5	0	0
1.06.02.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	10	0	0
1.06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	13	14	14	100	14	0	0
1.06.02.2.03.005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	1	1	100	1	0	0
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	85,00	85,00	85,00	85,00	100	80,00	6,46	8,08

1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,00	80,00	80,00	80,00	100	80,00	4,58	5,73
1.06.04.2.01.0 001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	146	140	99	99	100	100	50	50
1.06.04.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	100	0	0
1.06.04.2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	28	10	6	60	20	0	0
1.06.04.2.01.0 004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	20	0	0

1.06.04.2.01.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	50	50	100	100	0	0
1.06.04.2.01.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	100	0	0
1.06.04.2.01.007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	10	0	0
1.06.04.2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	5	5	100	50	0	0
1.06.04.2.01.009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	20	5	25

1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	10	0	0
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	20	0	0
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	20	1	5
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80,00	80	80,00	80,00	100	80	8,33	10,41
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80	80	300	300	100	17	75	441,18
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	75	50	66,67

1.06.04.2.02.005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	14	8	57,14	50	0	0
1.06.04.2.02.007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	75	0	0
1.06.04.2.02.008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	25	0	0
1.06.04.2.02.010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	20	0	0
1.06.04.2.02.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	25	25	100	20	0	0

1.06.04.2.02.0 012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	20	20	100	20		0
1.06.04.2.02.0 013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan rujukan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	20	20	100	20		0
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	80,00	80	80,00	80	100	80,00	22,88	28,6
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	80,00	80	80,00	80	100	80,00	22,88	28,6
1.06.05.2.02.0 001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800	5977	800	1804	225,5	800	549	68,63
1.06.05.2.02.0 003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2330	1691	2200	6503	295,59	120	0	0

1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117	117	97	97	100	179	0	0
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan	80,00	80	80,00	80	100	81,00	24,23	29,91
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	0	0	0	0	0	80,00	18,23	22,79
1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	500,00	220	44
1.06.06.2.01.002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	250,00	0	0
1.06.06.2.01.003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	1,00	0	0

1.06.06.2.01.004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	24,00	1	4,17
1.06.06.2.01.005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	100,00	43	43
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80,00	80	80,00	80	100	80,00	30,22	37,78
1.06.06.2.02.002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	134	130	130	100	225	68	30,22
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	85,00	80	85,00	85	100	86,00	8,33	9,69
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90,00	80	90,00	90	100	90,00	8,33	9,26

1.06.07.2.01.001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	10	1	1	100	1	0	0
1.06.07.2.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1	1	8	8	100	1	0	0
1.06.07.2.01.003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	90	90	36	36	100	24	6	25
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	51,00	51	51,00	51	100	53	31	58,49

2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55,00	52	55,00	52	94,55	55	62	112,73
2.08.02.2.01.0 002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	2	1	50
2.08.02.2.01.0 006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	0	0	0	0	0	100	12	12
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6,00	6	6,00	6	100	6,00	0	0
2.08.02.2.02.0 001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100	2	0	0

2.08.02.2.02.002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23	23	23	23	100	23	0	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	100	100	100	100	100	15,97	15,97
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	0	0
2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	2	2	100	2	0	0
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	47,92	47,92

2.08.03.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24	24	24	17	70,83	24	8	33,33
2.08.03.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	25	26	104	25	15	60
2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitas pengembangan kapasitas kelembagaan	100	1	100	100	100	100	0	0
2.08.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41	41	41	3	7,32	41	0	0
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola dan dimanfaatkan	30	30	30	30	100	41	0	0

2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terpilah	30	30	30	30	100	30	0	0
2.08.05.2.01.002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	100	1	0	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	80	80	80	80	100	90	22,22	24,69
2.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	70	70	70	70	100	70	0	0
2.08.06.2.01.001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	27	27	10	10	100	10	0	0

		Pemerintah, Media dan Dunia Usaha								
2.08.06.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	2	2	100	2	0	0
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	80	80	80	80	100	80	44,44	55,55
2.08.06.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29	29	29	29	100	29	0	0
2.08.06.2.02.003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100	3	1	33,33

2.08.06.2.02.004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34	34	1	1	100	1	1	100
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak	100	100	100	100	100	100	11,11	11,11
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100	100	100	100	100	0	0
2.08.07.2.01.004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	N/A	N/A	20	35	175	20	0	0
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	100	100	100	100	100	0	0
2.08.07.2.02.006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43	43	15	26	173,33	15	5	33,33

2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	0	100	100	100	100	0	0
2.08.07.2.03.006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0	0	20	70	350	20	0	0
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	90	90	90	100	90	25	27,78

2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90	90	90	90	100	90	25	27,78
2.13.05.2.01.002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	1	1	100	1	0	0
2.13.05.2.01.003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	4	4	100	2	0	0

		yang Ditingkatkan Kapasitasnya								
2.13.05.2.01.007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1	1	100	1	1	100
2.13.05.2.01.009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	1	1	100	1	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo tidak terlepas dari Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman pada pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.

Untuk urusan Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD yang merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025*	2026	2027	
1	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40,08%	100%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17,67%	100%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,77%	100%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47,09%	100%	100%	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22,26%	100%	100%	

Catatan : Untuk realisasi capaian 2025 (diisikan capaian s.d triwulan I 2025)

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Target Indikator Tujuan Kinerja Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN				
	Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2024)	Target Kinerja	
				2025	2026
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	46,28	42	40
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,49	96,78	96,91

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Secara umum isu-isu strategis yang menjadi **tantangan** Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasar data akhir tahun 2024 Jumlah PMKS di kota Probolinggo terdapat 112.880 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi diantaranya: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan

Perlu dipahami bahwa dalam penanganan PMKS, didapatkan kondisi bahwa tidak semua PMKS dapat menikmati hasil pembangunan dan hidup secara layak, berkualitas serta bermartabat. Masih banyak masyarakat dalam rentang perjalanan kehidupannya mengalami kesulitan, hambatan dan permasalahan yang

menghambat keberfungsian sosialnya secara layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1,P2 dan Garis Kemiskinan Kota Probolinggo, 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	17.720	7,43	1,19	0,28	524.528
2021	17.910	7,44	0,90	0,17	545.955
2022	16.160	6,65	1,04	0,23	575.195
2023	15.860	6,48	1,13	0,24	628.380
2024	15.240	6,18	0,98	0,21	654.409

Sumber : BPS

Di sisi lain, penanganan PMKS belum terlaksana secara optimal dan telah menjadi isu bersama baik permasalahan internal maupun eksternal dari PMKS itu sendiri. Faktor internal yang dirasakan PMKS adalah ketidakberdayaannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemanfaatan dalam mengakses sistem-sistem sumber yang ada secara normatif. Sedangkan faktor eksternal adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan belum optimal pemerintah dalam penanganan permasalahan PMKS yang berada di masyarakat. Hal itu dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Rendahnya sinergisitas penyelenggaraan pelayanan sosial baik melalui lembaga pelayanan sosial pemerintah maupun bukan pemerintah/swasta.
- 2) Organisasi/Tim bekerja sendiri sendiri sesuai dengan kewenangan atau bidangnya masing-masing.
- 3) Pemahaman bahwa masalah sosial ini merupakan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Berdasarkan data BPS per desember 2024 jumlah masyarakat miskin kota probolinggo mencapai 15.240 jiwa atau 6,18 persen dari total penduduk Kota Probolinggo. Masyarakat miskin ini ditandai dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif.

- 5) Dukungan kualitas SDM pada bidang pengampu urusan sosial kurang.

b. Masih Banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Isu-isu yang perlu ditangani dalam konteks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota probolinggo yaitu:

- 1) Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Berdasarkan data tahun 2023 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan data tahun 2022, sedangkan sampai triwulan I tahun 2025 kasus yang terjadi adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah kasus Anak
2022	20	22
2023	26	29
2024	14	16
2025	8	10

Sumber: Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo, April 2025

- 2) Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan. Dibutuhkannya semacam panduan pelaksanaan akan membantu unit organisasi untuk menerapkan PUG di masing-masing sub sektornya.
- 3. Kebijakan pelaksanaan urusan masih banyak yang netral gender. Hal ini disebabkan oleh karena perspektif gender belum terintegrasikan pada regulasi
- 4. keterbatasan SDM P3A yang sensitif dan responsif gender. Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM P3A belum didukung

dengan sistem training yang memadai, seperti adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik P3A. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat kelurahan dan pemanfaat. Masih dibutuhkannya Penyuluh yang mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluh akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.

5. Anggaran responsif gender (ARG) belum menyasar pada indikator kinerja pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja Kota. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.
6. Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis gender. Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. Belum adanya KKP sudah ada panduan data terpilah dan telah dipedomani sehingga data terpilah sudah ada di masing-masing perangkat daerah. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang ter-update secara reguler. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis gender.
7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender. Hal ini disebabkan oleh karena analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi.

Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.

8. Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan di kelurahan. Hal ini disebabkan oleh karena perempuan belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan belum menjadi bagian penting dalam organisasi masyarakat, sehingga kurang memberi kepastian dalam mendapatkan akses terhadap pembangunan. Tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan kebutuhan perempuan tidak muncul sebagai masalah yang harus diselesaikan.

Berbagai **peluang** yang dapat dioptimalkan sebagai upaya mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo, antara lain:

1. Terdapat sarana pelayanan Shelter/rumah singgah, yang memberikan layanan berupa rumah singgah/tempat sementara/tempat berlindung atau berkelanjutan untuk kondisi tertentu guna menyiapkan kondisi mental, psikologi, keberfungsian sosial penerima layanan (klien PMKS) sebelum mendapatkan rujukan yang sesuai dengan kriteria permasalahannya;
2. Berbagai layanan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, antara lain:
 - a. Pelayanan Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) dan Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - b. Pelayanan Pengaduan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
 - c. Pelayanan Rekomendasi Adopsi Anak;
 - d. Pelayanan Ambulans Jenazah Gratis;
 - e. Pelayanan Bantuan Sosial;
 - f. Pelayanan Pengaduan pada Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULTPK);

- g. Pelayanan Pengaduan bantuan Pangan Non Tunai – Program Keluarga Harapan (BPNT-PKH);

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Review terhadap Perubahan RKPD tahun 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 terlihat pada Tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD tahun 2025
Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				16.447.155.436	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kota Probolinggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100 Persen	6.971.098.619	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Probolinggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100 Persen	6.919.378.333	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Persen	115.790.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Persen	115.790.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.910.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.910.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	106.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	106.880.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.331.720.513	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	5.138.034.318	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	5.175.237.216	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	4.994.000.591	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	110.928.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	110.928.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	45.555.297	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	33.105.727	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	1.215.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100 Persen	1.215.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.215.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.215.000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	245.139.408	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	268.905.317	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	16.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	16.200.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	228.939.408	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	252.705.317	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	323.356.295	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	100 Persen	331.056.295	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.648.890	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.648.890	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	16.661.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	16.661.200	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.189.062	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.189.062	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.560.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	176.067.143	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	183.767.143	

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	63.230.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	63.230.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 Persen	361.150.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	100 Persen	451.650.000	
Pengadaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	55.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	55.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	306.150.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	396.650.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 Persen	174.675.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Probolinggo	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	100 Persen	174.675.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	129.690.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	129.690.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.185.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.185.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	22.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	22.800.000	

		Umum Kantor yang Disediakan					Umum Kantor yang Disediakan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	418.052.403	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	438.052.403	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.484.193	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	23.484.193	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	75.926.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	75.926.470	
Pemeliharaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	10.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	67.323.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	67.323.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	241.318.240	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	261.318.240	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	81 Persen	53.122.920	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	81 Persen	53.122.920	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber	80 Persen	53.122.920	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Kota Probolinggo	Persentase Pengembangan Potensi Sumber	80 Persen	53.122.920	

Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	4.732.500	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	4.732.500	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	42.697.500	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	42.697.500	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	1.359.820	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	1.359.820	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	3.184.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	3.184.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1.149.100	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	1.149.100	

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	86 Persen	1.115.495.897	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	86 Persen	1.177.795.897	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	904.855.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	967.155.000	
Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	746.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	746.000.000	
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.450.000	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.450.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	37.250.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	37.250.000	

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	25.250.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	39.905.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	39.905.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	7.700.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	7.700.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.500.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	51.050.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.000	

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.050.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.050.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.500.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.500.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1.500.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1.500.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.500.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.500.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	210.640.897	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	210.640.897	
Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	51.750.000	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	51.750.000	
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang	100 Orang	98.940.897	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang	100 Orang	98.940.897	

		Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penyediaan Alat Bantu	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	38.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	38.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Proboling go	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	3.600.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Proboling go	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	3.600.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Proboling go	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	4.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Proboling go	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	4.000.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	3.600.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	3.600.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	5.250.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25 Orang	5.250.000	

							Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2.500.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2.500.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	41 Persen	7.909.287.245	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	41 Persen	7.910.935.987	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 Persen	7.909.287.245	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 Persen	7.910.935.987	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800 Orang	429.299.148	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800 Orang	432.908.976	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Keluarga	6.938.345.400	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Keluarga	6.938.345.400	

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Orang	541.642.697	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Orang	539.681.611	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Probolinggo	Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan	81 Persen	263.690.788	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Probolinggo	Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan	81 Persen	263.640.788	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80 Persen	160.346.880	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	80 Persen	160.296.880	
Penyediaan Makanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	55.450.000	Penyediaan Makanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	56.900.000	
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	8.796.880	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	7.696.880	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	8.200.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	8.200.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	24 Orang	2.400.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	24 Orang	2.400.000	

		Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Proboling go	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	85.500.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Proboling go	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	85.100.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80 Persen	103.343.90 8	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80 Persen	103.343.908	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	103.343.90 8	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Proboling go	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	103.343.908	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Proboling go	Presentase TMP yang dikelola	86 Persen	120.524.59 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kota Proboling go	Presentase TMP yang dikelola	86 Persen	122.281.511	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90 Persen	120.524.59 7	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	90 Persen	122.281.511	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokume n	7.875.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Proboling go	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokume n	7.875.000	

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	27.360.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	27.360.000	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24 Laporan	85.289.597	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24 Laporan	87.046.511	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.597.236.947	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.509.816.003	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	53 Persen	341.104.650	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	53 Persen	344.743.650	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	66.787.350	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	61.637.350	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	33.982.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	33.982.750	

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	32.804.600	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	27.654.600	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	274.317.300	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	283.106.300	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	182.875.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	186.775.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisasi	91.442.300	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisasi	96.331.300	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	342.391.950	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan	100 Persen	344.213.950	

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	100 Persen	59.250.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	100 Persen	59.250.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	59.250.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	59.250.000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi	100 Persen	272.941.950	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi	100 Persen	274.763.950	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 Orang	105.785.950	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 Orang	107.607.950	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	167.156.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	167.156.000	

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	100 Persen	10.200.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	100 Persen	10.200.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2 Orang	10.200.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	2 Orang	10.200.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	41 Persen	2.965.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	41 Persen	2.965.000	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	30 Persen	2.965.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	30 Persen	2.965.000	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.965.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.965.000	

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	90 Persen	545.199.575	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	90 Persen	548.809.403	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	70 Persen	122.893.700	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	70 Persen	122.893.700	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	78.260.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	78.260.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.633.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44.633.700	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	80 Persen	422.305.875	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	80 Persen	425.915.703	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Dokumen	24.711.375	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Dokumen	24.711.375	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	348.532.500	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	348.532.500	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.062.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.671.828	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	100 Persen	269.084.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Probolinggo	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	100 Persen	269.084.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	70.750.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	70 Persen	70.750.000	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	20 orang	70.750.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	20 orang	70.750.000	

		/program/ kegiatan pencegahan KTA					/program/ kegiatan pencegahan KTA			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	120.134.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	120.134.000	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Probolinggo	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Layanan	120.134.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Probolinggo	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Layanan	120.134.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	78.200.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Persen	78.200.000	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang	78.200.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	20 Orang	78.200.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.087.420.944	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	91 Persen	1.242.150.030	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	91 Persen	1.087.420.944	

MASYARAKAT HUKUM ADAT					MASYARAKAT HUKUM ADAT					
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Persen	1.242.150.030	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Persen	1.087.420.944	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	13.951.030	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	17.701.030	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Lembaga	723.875.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Lembaga	563.375.000	

		yang Ditingkatkan Kapasitasnya					yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	33.390.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	33.390.000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	470.934.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	472.954.914	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Probolinggo membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada akhir tahun 2021, ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

N o.	Program/Kegiatan Tahun 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	80 Persen	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	

	Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Persen	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 orang	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Probolinggo	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	41 Persen	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	50 Persen	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	53 Persen	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	

Catatan : Memasukkan usulan musrenbang/pokir yang ditarik OPD (apabila tidak memiliki usulan musrenbang/pokir ditulis NIHIL)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah:

- 1. Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat;
- 2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kesenjangan Gender.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif
- 3. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan;
- 4. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak;
- 5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tercantum pada tabel di bawah ini:

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KINERJA AWAL	TARGET KINERJA	
			2024	2025	2026
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	33%	33%	32,75 %
	Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	89%	90,00 %	90,25%
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP		84,39	84,69
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	68,4%	96,80	96,98
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya	-	Utama	Utama
	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
		Peringkat Kota Layak Anak	-	Utama	Utama

Adapun tujuan dan sasaran Dinas sosial mengacu pada RPJMD dapat di jelaskan dengan cascading sebagai berikut:



3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terbagi menjadi Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib.

Berikut Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2025	Rencana P. APBD Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				16.447.155.436				
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	Kota Probolinggo	100 Persen	6.919.378.333	DAU		100 Persen	7.913.395.198
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolinggo	100 Persen	115.790.000	DAU		100 Persen	85.750.000

1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	5 Dokumen	8.910.000	DAU		5 Dokumen	18.750.000
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	106.880.000	DAU		4 Laporan	67.000.000
1.6.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	5.138.034.318	DAU		100 Persen	6.764.074.698
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	42 Orang	4.994.000.591	DAU		42 Orang	6.598.974.698
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	700 Dokumen	110.928.000	DAU		700 Dokumen	100.100.000
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	33.105.727	DAU		4 Laporan	65.000.000
1.06.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	1.215.000	DAU		100 Persen	13.962.500

1.06.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	1 Laporan	1.215.000	DAU		1 Laporan	13.962.500
1.6.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	268.905.317	DAU		100 Persen	54.000.000
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Probolinggo	60 paket	16.200.000	DAU		60 paket	30.000.000
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	12 dokumen	252.705.317	DAU		12 dokumen	24.000.000
1.6.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	331.056.295	DAU		100 Persen	170.176.000
1.06.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	39.648.890	DAU		4 Paket	28.000.000
1.06.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	16.661.200	DAU		4 Paket	20.000.000
1.06.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	11.189.062	DAU		4 Paket	5.000.000
1.06.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Dokumen	1.560.000	DAU		12 Dokumen	2.400.000

1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	6 Laporan	15.000.000	DAU		6 Laporan	6.000.000
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	24 Laporan	183.767.143	DAU		24 Laporan	72.776.000
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	12 Dokumen	63.230.000	DAU		12 Dokumen	36.000.000
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	Kota Probolinggo	100 Persen	451.650.000	DAU		100 Persen	55.812.000
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Probolinggo	5 Unit	55.000.000	DAU		5 Unit	25.937.000
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolinggo	5 Unit	396.650.000	DAU		5 Unit	29.875.000
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	Kota Probolinggo	100 Persen	174.675.000	DAU		100 Persen	399.620.000
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	4 Laporan	3.000.000	DAU		4 Laporan	9.276.000
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	11 Laporan	129.690.000	DAU		11 Laporan	139.594.000

1.06.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	1 Laporan	19.185.000	DAU		1 Laporan	25.750.000
1.06.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Laporan	22.800.000	DAU		12 Laporan	225.000.000
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Probolinggo	100 Persen	438.052.403	DAU		100 Persen	370.000.000
1.06.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolinggo	1 Unit	23.484.193	DAU		1 Unit	47.000.000
1.06.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Probolinggo	29 Unit	75.926.470	DAU		29 Unit	175.000.000
1.06.01.2.09.000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Probolinggo	30 Unit	10.000.000	DAU		30 Unit	15.000.000
1.06.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	73 Unit	67.323.500	DAU		73 Unit	49.000.000
1.06.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolinggo	4 Unit	261.318.240	DAU		4 Unit	84.000.000

1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	81 Persen	53.122.920			82 Persen	80.084.586
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Probolinggo					80 Persen	2.500.000
1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Probolinggo					1 Dokumen	2.500.000
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Probolinggo	80 Persen	53.122.920	DAU		81 Persen	65.084.586
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	29 Orang	4.732.500	DAU			
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	5 Orang	42.697.500	DAU			

1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	10 Keluarga	1.359.820	DAU		10 Keluarga	7.379.300
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	14 Lembaga	3.184.000	DAU		14 Lembaga	4.200.000
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Sertifikat	1.149.100	DAU			
1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Kota Probolinggo					5 Orang	7.379.300
1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Kota Probolinggo					100 Orang	7.379.300

1.06.02.2.03.001 2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					1 Orang	1.850.000
1.06.02.2.03.001 3	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Kota Probolinggo					2 Lembaga	7.379.300
1.06.02.2.03.001 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kota Probolinggo					5 Orang	7.379.300
1.06.02.2.03.001 5	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kota Probolinggo					5 Orang	7.379.300
1.06.02.2.03.001 6	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Kota Probolinggo					50 Laporan	7.379.300

1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kota Probolinggo					5 Orang	7.379.486
1.06.02.4.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota		Kota Probolinggo					80 persen	7.500.000
1.06.02.4.03.0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Kota Probolinggo					2 Keluarga	2.500.000
1.06.02.4.03.0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Kota Probolinggo					100 Laporan	2.500.000
1.06.02.4.03.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Kota Probolinggo					10 Orang	2.500.000
1.06.02.4.04	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial		Kota Probolinggo					80 persen	2.500.000
1.06.02.4.04.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Kota Probolinggo					500 Orang	2.500.000

1.06.02.4.05	Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah		Kota Probolinggo					80 persen	2.500.000
1.06.02.4.05.0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Kota Probolinggo					14 Lembaga	2.500.000
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Kota Probolinggo	86 Persen	1.177.795.897	DAU		86 Persen	1.887.207.883
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Probolinggo	80 Persen	967.155.000	DAU		80 Persen	1.543.000.000
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	746.000.000	DAU		100 Orang	840.000.000
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	1.450.000	DAU		100 Orang	20.000.000

1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	37.250.000	DAU		20 Orang	80.000.000
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	25.250.000	DAU		20 Orang	30.000.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	39.905.000	DAU		100 Orang	215.000.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	7.700.000	DAU		100 Orang	215.000.000
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	10 Orang	51.050.000	DAU			

1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Orang	40.000.000	DAU		50 Orang	75.000.000
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	10.050.000	DAU		20 Orang	4.000.000
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	10 Orang	1.500.000	DAU		10 Orang	2.000.000
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	1.500.000	DAU		20 Orang	30.000.000
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	5.500.000	DAU		20 Orang	6.000.000
1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	2.000.000

1.06.04.2.01.001 5	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi						2 Orang	6.000.000
1.06.04.2.01.001 6	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Orang	6.000.000
1.06.04.2.01.001 7	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	6.000.000
1.06.04.2.01.001 8	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial						6 Orang	6.000.000
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Probolinggo	80 Persen	210.640.897	DAU		80 Persen	344.207.883

1.06.04.2.02.000 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo			DAU		75 Orang	1.500.000
1.06.04.2.02.000 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo			DAU		50 Orang	3.000.000
1.06.04.2.02.000 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	300 Orang	51.750.000	DAU		300 Orang	47.039.383
1.06.04.2.02.000 4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	98.940.897	DAU		100 Orang	71.387.000
1.06.04.2.02.000 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	17 Orang	38.000.000	DAU		17 Orang	153.000.000
1.06.04.2.02.000 6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo			DAU		75 Orang	2.250.000

1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	75 Orang	3.600.000	DAU		75 Orang	8.250.000
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Orang	4.000.000	DAU		50 Orang	14.500.000
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo			DAU		75 Orang	6.500.000
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	75 Orang	3.600.000	DAU		75 Orang	8.000.000
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	25 Orang	5.250.000	DAU		25 Orang	5.437.500

1.06.04.2.02.001 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	2.500.000	DAU		20 Orang	5.687.500
1.06.04.2.02.001 3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	3.000.000	DAU		20 Orang	7.812.500
1.06.04.2.02.001 4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo			DAU		2 Dokumen	2.461.000
1.06.04.2.02.001 5	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota						2 Orang	2.461.000
1.06.04.2.02.001 6	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya						50 Orang	2.461.000

1.06.04.2.02.001 7	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi						2 Orang	2.461.000
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Kota Probolinggo	41 Persen	7.910.935.987	DAU		42 Persen	599.172.429
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							Persen	7.500.000
1.06.05.2.01.000 1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	2.500.000
1.06.05.2.01.000 2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	2.500.000
1.06.05.2.01.000 3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota						10 Orang	2.500.000
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	Kota Probolinggo	50 Persen	7.910.935.987	DAU		50 persen	591.672.429
1.06.05.2.02.000 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Probolinggo	800 Orang	432.908.976	DAU		800 Orang	405.000.000

1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	120 Keluarga	6.938.345.400	DAU		0	0
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	243 Orang	539.681.611	DAU		116 Orang	115.000.000
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						120 Orang	64.172.429
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan						100 Usulan	2.500.000
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota						5 Orang	2.500.000
1.06.05.2.02.0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah						5 Orang	2.500.000

1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Layanan Fasilitas Penanganan Bencana sesuai ketentuan	Kota Probolinggo	81 Persen	263.640.788	DAU		82 Persen	427.032.835
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	Kota Probolinggo	80 Persen	160.296.880	DAU		80 Persen	204.532.835
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	500 Orang	56.900.000	DAU		500 Orang	23.250.000
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	250 Orang	7.696.880	DAU		250 Orang	31.282.835
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Unit	8.200.000	DAU		0	0
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	24 Orang	2.400.000	DAU		100 Orang	130.000.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	Kota Probolinggo	100 Orang	85.100.000	DAU		100 Orang	10.000.000

		Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.06.2.01.000 7	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota						100 Orang	10.000.000
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kota Probolingg o	80 Persen	103.343.908	DAU		80 Persen	222.500.000
1.06.06.2.02.000 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						5 Kampung	2.500.000
1.06.06.2.02.000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolingg o	225 Orang	103.343.908	DAU		225 Orang	197.500.000
1.06.06.2.02.000 3	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya						5 Orang	2.500.000
1.06.06.2.02.000 4	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas						3 Orang	2.500.000

1.06.06.2.02.0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi						3 Desa/Kelurahan	2.500.000
1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi						5 Orang	2.500.000
1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai						2 Keluarga	2.500.000
1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana						100 Orang	2.500.000
1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)						1 Dokumen	2.500.000
1.06.06.2.02.0010	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial						1 Daerah	2.500.000
1.06.06.2.02.0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan						100 Orang	2.500.000

1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang dikelola	Kota Probolinggo	86 Persen	122.281.511			87 Persen	158.946.990
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik	Kota Probolinggo	90 Persen	122.281.511			90 Persen	158.946.990
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	7.875.000			1 Dokumen	19.546.990
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Makam	27.360.000			1 Makam	40.000.000
1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	24 Laporan	87.046.511			24 Laporan	99.400.000
1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						5 Orang	2.500.000
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di						100 Orang	2.500.000

	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.597.236.947				
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.509.816.003				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	Kota Probolinggo	53 Persen	344.743.650			54 Persen	192.312.000
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Kota Probolinggo	55 Persen	61.637.350			55 Persen	70.046.551
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	2.500.000

2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	33.982.750			0	0
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kota Probolinggo	100 Orang	27.654.600			0	0
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG						2 Laporan	34.700.000
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi						4 Kebijakan	2.500.000
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan						37 Lembaga	22.846.551
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota						1 Laporan	2.500.000
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						5 Lembaga	2.500.000

2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek						50 Orang	2.500.000
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Probolinggo	6 Persen	283.106.300			6 Persen	115.000.000
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	186.775.000			2 Dokumen	0
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	23 Organisasi	96.331.300			23 Organisasi	0
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi						37 Lembaga	50.000.000

2.08.02.2.02.000 5	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi						37 Lembaga	2.500.000
2.08.02.2.02.000 6	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan						Lembaga	2.500.000
2.08.02.2.02.000 7	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	2.500.000
2.08.02.2.02.000 8	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi						150 Orang	55.000.000
2.08.02.2.02.000 9	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan						50 Orang	2.500.000

2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	344.213.950			100 Persen	196.912.342
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	Kota Probolinggo	100 Persen	59.250.000			100 Persen	2.172.342
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	59.250.000			0	0
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Laporan	500.000
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota						4 Dokumen	500.000
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota						30 Lembaga	500.000

2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi						1 Kebijakan	672.342
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi	Kota Probolinggo	100 Persen	274.763.950			100 Persen	157.840.000
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Probolinggo	24 Orang	107.607.950			0	0
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Layanan	167.156.000			0	0
2.08.03.2.02.0003	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					2 Orang	2.000.000
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi	Kota Probolinggo					24 Orang	11.000.000

		Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota							
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					16 Orang	40.500.000
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					10 Orang	18.900.000
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					4 Orang	1.000.000
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					24 Orang	55.690.000
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					24 Orang	28.750.000

2.08.03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan	Kota Probolinggo	100 Persen	10.200.000			100 Persen	36.900.000
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Probolinggo	41 Orang	10.200.000			0	0
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Kota Probolinggo					30 Orang	36.900.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang dikelola dan dimanfaatkan	Kota Probolinggo	41 Persen	2.965.000	DAU		42 Persen	6.857.000
2.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data gender dan anak yang terpilah	Kota Probolinggo	30 Persen	2.965.000	DAU		30 Persen	6.857.000
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	2.965.000	DAU		0	0

2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Probolinggo					1 Dokumen	2.857.000
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Kota Probolinggo					37 Lembaga	2.000.000
2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Kota Probolinggo					1 Dokumen	2.000.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	Kota Probolinggo	91 Persen	548.809.403			92 Persen	541.644.786
2.08.06.2.01.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelebagaan PHA	Kota Probolinggo	70 Persen	122.893.700			70 Persen	44.000.000
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Probolinggo	10 Organisasi	78.260.000			0	0

2.08.06.2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	44.633.700			0	0
2.08.06.2.01.000 3	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					5 Lembaga	22.000.000
2.08.06.2.01.000 4	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					20 Orang	2.500.000
2.08.06.2.01.000 5	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					2 Lembaga	2.500.000

		Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					2 Laporan	17.000.000
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi	Kota Probolinggo	80 Persen	425.915.703			80 Persen	497.644.786
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	29 Dokumen	24.711.375			0	0
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Probolinggo	3 Dokumen	348.532.500			0	0

	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	52.671.828			0	0
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kota Probolinggo					20 Orang	2.500.000
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					4 Dokumen	69.494.786
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kota Probolinggo					75 Lembaga	384.000.000

2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					1 Laporan	2.500.000
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kota Probolinggo					2 Lembaga	39.150.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan	Kota Probolinggo	100 Persen	269.084.000	DAU		100 Persen	300.155.475
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	Kota Probolinggo	100 Persen	70.750.000			70 Persen	65.000.000
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	20 orang	70.750.000			0	0
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kota Probolinggo					2 dokumen	2.500.000

2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kota Probolinggo					2 Kegiatan	52.500.000
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo					1 Laporan	2.500.000
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo					4 Dokumen	2.500.000
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo					1 Orang	2.500.000
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kota Probolinggo					1 Kebijakan	2.500.000
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Probolinggo	100 Persen	120.134.000	DAU		100 Persen	180.155.475
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Probolinggo	15 Layanan	120.134.000	DAU		0	0

2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					24 Orang	22.519.675
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					16 Orang	22.519.400
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					10 Orang	22.519.400
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					24 Orang	22.519.400
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					10 Orang	22.519.400
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					24 Orang	22.519.400

2.08.07.2.02.001 4	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					4 Orang	22.519.400
2.08.07.2.02.001 5	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					24 Orang	22.519.400
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Probolinggo	100 Persen	78.200.000			70 Persen	55.000.000
2.08.07.2.03.000 6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Probolinggo	20 Orang	78.200.000			0	0
2.08.07.2.03.000 7	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Kota Probolinggo					1 Dokumen	2.500.000
2.08.07.2.03.000 9	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan	Kota Probolinggo					1 Dokumen	2.500.000

	perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota							
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					1 Dokumen	2.500.000
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Kota Probolinggo					20 Lembaga	2.500.000
2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo					4 Dokumen	2.500.000

2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Kota Probolinggo					70 Orang	40.000.000
2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Kota Probolinggo					1 Lembaga	2.500.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.087.420.944				
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Kota Probolinggo	91 Persen	1.087.420.944			92 Persen	1.340.245.947
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Kota Probolinggo	90 Persen	1.087.420.944			90 Persen	1.340.245.947

2.13.05.2.01.000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	1 Dokumen	17.701.030			1 Dokumen	62.962.500
2.13.05.2.01.000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Probolinggo	2 Lembaga	563.375.000			2 Lembaga	1.104.000.000
2.13.05.2.01.000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	1 Laporan	33.390.000			1 Laporan	164.658.447
2.13.05.2.01.000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	1 Dokumen	472.954.914			1 Dokumen	8.625.000

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, khususnya triwulan III dan IV. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Perubahan Rencana kerja ini juga secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Probolinggo, Juni 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**



Dr. R. SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 196707111988091001